



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **POEDJI WIDODO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH**
3. NHK : **857659**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **260.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **64.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA 28D (MIO/AL115S) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, BAJAJ PULSAR 180 DTSI UG 4 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 MT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOTOR, HONDA II1B0N42L0 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **91.872.278**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **416.372.278**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **416.372.278**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.